BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SUMENEP

A. Geografis, Administratif dan Kondisi Fisik

Gambaran umum wilayah Kabupaten Sumenep meliputi kondisi geografis,[1] administratif, kondisi fisik wilayah, demografi, keuangan dan perekonomian daerah, sosial budaya dan kelembagaan.

1. Geografis

Wilayah Kabupaten Sumenep berada diujung timur Pulau Madura dengan letak geografis diantara113º 32' - 116º 16' Bujur Timur dan 4º 55' - 7º 24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Selat Madura
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan
- Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores[2]

Wilayah Kabupaten Sumenep terdiri dari daratan dan kepulauan. Kabupaten Sumenep memiliki 126 pulau (sesuai dengan hasil sinkronisasi luas Kabupaten Sumenep Tahun 2002), tersebar membentuk gugusan pulau-pulau baik berpenghuni (48 pulau) maupun tidak berpenghuni (78

[1] Secara geografis Sumenep terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan dengan lus daratnya 1. 146,93 km km^2 atau sekitar 54,79%, bagian daratan terdiri atas tujuh belas kecamatan dan satu pulau di kecamatan Dungkek. Sedangkan luas wilayah kepulauan 946, 53 km^2 atau sekitar 45,21% meliputi 126 buah pulau. Temperature rata-rata 24,7 ºC – 33,6ºC. Secara administrasi wilayah Kabupaten Sumenep dibagi mejadi 27 kecamatan, 328 desa dan 4 kelurahan. A. Busyro Karim, *Menuju Sumenep Cerdas 2015,* Ed. Muhammad Saidi, (Yogyakarta, Absolut Media, 2014), xi

[2] Tim Penyusun, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sumene*, (Sumenep: tp, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pulau). Pulau paling utara adalah Pulau Karamian yang terletak di Kecamatan Masalembu dengan jarak ±151 mil laut dari Pelabuhan Kalianget, dan pulau yang paling timur adalah Pulau Sakala dengan jarak ±165 miI laut dari Pelabuhan Kalianget.[3]

2. Administratif

Secara administratif[4] Kabupaten Sumenep termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 wilayah kecamatan, 332 desa/kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 2,093.47 km^2. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kota Sumenep tepatnya di Kecamatan Kota Sumenep.

Tabel 3.1
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Desa/ Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			Km2	% terhadap Total	Km2	% terhadap Total
1	Pragaan	14	57.84	2.76	9.32	0.45
2	Bluto	20	51.25	2.45	13.07	0.62
3	Saronggi	14	67.71	3.23	9.76	0.47
4	Giligenting	8	30.32	1.45	6.65	0.32
5	Talango	8	50.27	2.40	7.81	0.37
6	Kalianget	7	30.19	1.44	3.12	0.15
7	Kota sumenep	16	27.84	1.33	6.83	0.33
8	Batuan	7	27.10	1.29	4.09	0.20
9	Lenteng	20	71.41	3.41	4.40	0.21

[3] Ibid,.
[4] Berdasarkan perbup sumenep No. 11 tahun 2006 tentang luas wilayah administrasi kabupaten sumenep telah ditetapkan 126 pulau bernama. Kondisi geografis dan tipografis itulah yang menjadi salah satu tantangan untuk memenuhi gagasan besar itu, meskipun kita tidak bisa menagikn bahwa dalam waktu yang bersamaan sandungan itu juga (bisa) sebagai pendukung untuk memenuhi gagasan besar itu. A. Busyro Karim, *Menuju Sumenep Cerdas 2015*, Ed. Muhammad Saidi (Yogyakarta, Absolut Media, 2014), xi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			Km2	% terhadap Total	Km2	% terhadap Total
10	Ganding	14	53.97	2.58	6.20	0.30
11	Guluk guluk	12	59.57	2.85	5.68	0.27
12	Pasongsongan	10	119.03	5.69	15.05	0.72
13	Ambuten	15	50.54	2.41	4.36	0.21
14	Rubaru	11	84.46	4.03	7.45	0.36
15	Dasuk	15	64.50	3.08	4.68	0.22
16	Manding	11	68.88	3.29	3.04	0.15
17	Batu putih	14	112.31	5.36	10.61	0.51
18	Gapura	17	65.78	3.14	7.98	0.38
19	Batang-batang	16	80.36	3.84	20.57	0.98
20	Dungkek	15	63.35	3.03	6.79	0.32
21	Nonggunong	8	40.08	1.91	1.46	0.07
22	Gayam	10	88.40	4.22	5.85	0.28
23	Raas	9	38.90	1.86	5.78	0.28
24	Sapeken	9	201.89	9.64	1.59	0.08
25	Arjasa	19	241.99	11.56	5.88	0.28
26	Kangayan	9	204.68	9.78	5.88	0.28
27	Masalembu	4	40.85	1.95	2.90	0.14
	Jumlah	**332**	**2,093.47**	**100.00**	**186.80**	**8.92**

Sumber: Kabupaten Sumenep Dalam Angka 2012

3.Topografi

Kondisi Topografi[5] di Kabupaten Sumenep dapat dilihat dari suatu kondisi objektif ketinggian dan kemiringan lahan. Kemiringan lahan ini merupakan salah satu faktor penting yang perlu dilihat dalam aspek topografi, karena beberapa peruntukan lahan memerlukan persyaratan kemiringan lahan.

[5] Secara topografis Sumenep merupakan wilayah kepulauan dengan 126 pulau, terdiri atas 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. A. Busyro Karim, *Menuju Sumenep Cerdas 2015*, Ed. Muhammad Saidi (Yogyakarta, Absolut Media, 2014), xi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sumenep secara umum berada pada ketinggian antara 0-500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan sebagian lagi berada pada ketinggian antara 500 – 1000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ketinggian wilayah di Kabupaten Sumenep dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Wilayah dengan ketinggian 0 – 500 meter dpl seluas 208.697,40 Ha atau mencapai luasan sekitar 99,72 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep;

b. Wilayah yang memiliki ketinggian 500-1000 meter dpl mencapai luasan 578,42 Ha atau sekitar 0,28 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Sumenep;

Selain dari ketinggian, kondisi topografi juga dapat dilihat dari kemiringan lahan. Kabupaten Sumenep dengan luas sekitar 2.093,458 Km^2, memiliki tingkat kemiringan lahan yang bervariasi antara 0%-30%, 30% - 60% dan di atas 60%. Wilayah yang paling luas memiliki kemiringan 0-30%, dengan capaian luasan sekitar 1.613,29 Ha atau 77,51%.[6]

Sedangkan kemiringan terluas berikutnya berada pada level 30-60% dengan capaian luasan sekitar 437,39 Ha atau 21,02%. Kawasan ini dijumpai berupa kawasan perbukitan. Sedangkan pada ketinggian > 60 % berupa pegunungan yang hanya mencapai luasan sekitar 30,75 Ha atau 1,48 %.

[6] Tim Penyusun, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sumenep*, (Sumenep: tp, 2012), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hidrologi

Secara kondisi hidrologi Kabupaten Sumenep dipengaruhi oleh berbagai keberadaan sungai yang berjumlah 11 (sebelas) sungai besar.Sumber air baku berupa sungai di Kabupaten Sumenep dimana wilayah daratan saat ini memiliki debit yang relatif sedang. Maka ketika dilihat dari kondisi debit sungai tersebut, Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan juga memilki wilayah kepulauan yang jauh dan banyak merupakan wilayah yang memiliki potensi hidrologi yang cukup dalam kegiatan drainase perkotaan dan perdesaan. Air yang mengalir dari sungai tersebut bermanfaat untuk kegiatan pertanian yaitu pengairan sawah (Irigasi).[7]

5. Klimatologi

Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu curah hujan, temperatur, kelembaban dan tekanan udara. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 98,5. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga cuhan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2010 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Mei, yaitu 67,5. Pada bulan Juli curah hujan menurun menjadi 0,1. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan sampai bulan Oktober.[8] Bulan ini adalah merupakan puncak dari musim kemarau yang terjadi di Sumenep.

---

[7] Tim Penyusun, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sumenep* (Sumenep: tp, 2012), 4.
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 2012 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 29,6 ^{0}C, yang terjadi pada bulan Oktober. Sedangkan temperatur paling rendah mencapai 24,5 ^{0}C yang terjadi pada bulan Pebruari. Sementara itu penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai 100%, yang terjadi pada bulan Agustus dan pada bulan Oktober mencapai 99 %. Penyinaran matahari terendah sebesar 56%, yang terjadi pada bulan Pebruari.

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di Kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Pada bulan Juli kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 8,4 knot sedangkan bulan September kecepatan angin mencapai 7,1 knot. Sementara pada bulan Maret, Nopember dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

Gambar 3.1
Kondisi Cuaca Tiap Bulan di Kabupaten Sumenep

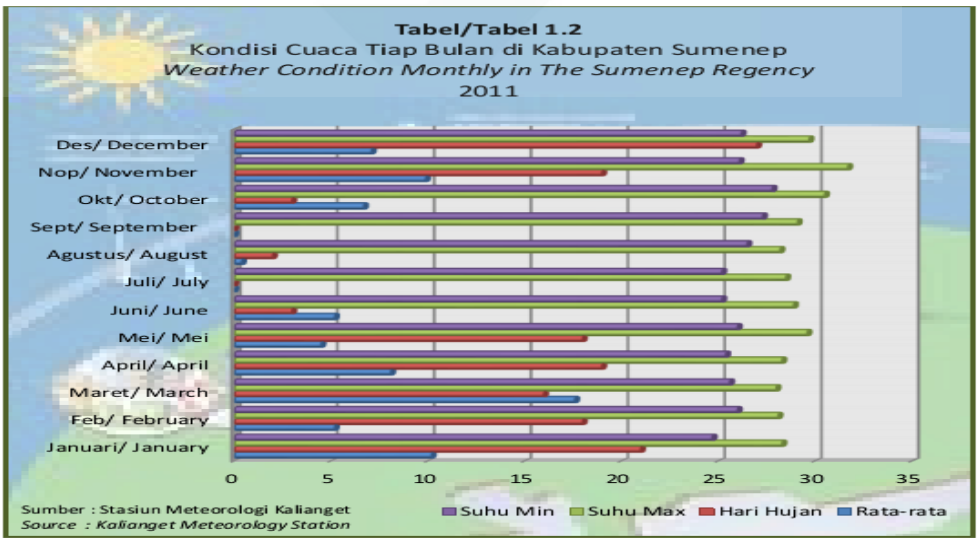

Sumber : Sumenep dalam Angka 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Demografi

Kondisi demografi atau kependudukan di Kabupaten Sumenep dapat digambarkan melalui jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2012 jumlah penduduk di Kabupaten Sumenep adalah 1.053.640 jiwa dengan persebaran jumlah penduduk tertinggi berada pada Kecamatan Kota Sumenep dengan jumlah penduduk mencapai 71.514 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Batuan dengan jumlah penduduk 12.228 jiwa. Berikut akan disajikan grafik pertumbuhan penduduk dan tabel jumlah serta pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Sumenep.[9]

Gambar 3.2
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sumenep
Tahun 2013-2017

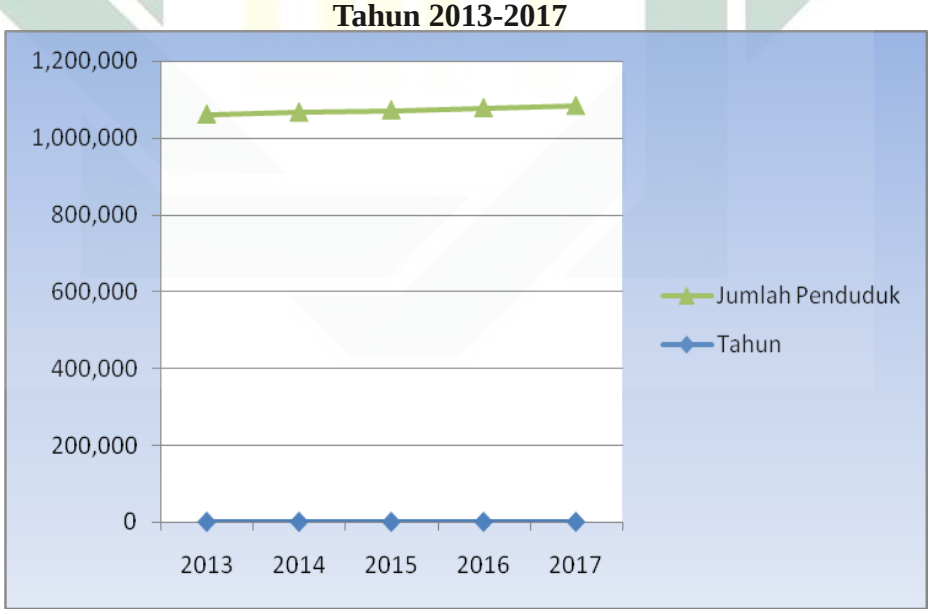

Sumber : Sumenep dalam Angka 2012

[9] Tim Penyusun, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sumenep* (Sumenep: tp, 2012), 8. Lihat juga masyarakat Sumenep cenderung hidup berkelompok, mereka bermukim da tinggal secara sederhana terdiri atas satu keluarga dan gabunga beberapa keluarga yang dikenal dengan istilah *"taneyan lanjheng"* Tim Penulis Sejarah Sumenep, *Sejarah Sumenep* (Sumenep: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumenep, 2003), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Keuangan dan Perekonomian Daerah

Sumber data statistik keuangan pemerintah daerah adalah bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Data yang disajikan meliputi realisasi pendapatan dan belanja keuangan daerah. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sedangkan belanja atau pengeluaran keuangan daerah terdiri dari belanja aparatur dan belanja publik. PAD adalah pendapatan yang dapat dibangkitkan daerah sebagai pendapatannya, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan perusahaan dan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD. Dana Perimbangan adalah yang berasal dari pemerintah pusat terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagi hasil pajak/bantuan propinsi. Pendapatan lain-lain yang sah adalah bantuan dana penyeimbang dari pemerintah propinsi. Belanja aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Sedangkan belanja publik terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

C. Penataan Umum

Tujuan umum penataan ruang untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri, sehingga mampu mendorong kemandirian dan daya saing daerah tanpa melupakan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam, dengan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terwujudnya keseimbangan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah perkotaan dan perdesaan baik di wilayah daratan dan kepulauan guna menciptakan kesejahteraan di bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui pembangunan fisik dan nonfisik;
2. Terwujudnya suatu kawasan yang menjadi salah satu gerbang masuk Jawa Timur melalui pengembangan konsep sistem pintu jamak (multi gate system) untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan kawasan, khususnya yang berbasis kebaharian.
3. Terwujudnya suatu kawasan yang berjatidiri dan beridentitas yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal guna mencapai kemajuan yang mandiri.

Pandangan peneliti potensi sumber daya alam Sumenep yang begitu melimpah ruah baik dari sektor laut, minyak dan gas bumi (migas) atau sumber daya alam lain yang begitu melimpah dan semua ini banyak dimiliki oleh Sumenep dan tidak banyak dimiliki oleh kabupaten lain di Madura, sebagai generasi yang tentunya semua ini butuh pada pengimbangan penanaman karakter yang baik, pantang menyerah seperti adagium nenek moyang kita *Abantal ombe' asapo' angen,* (berbantal ombak dan beselimut angin) ini komitmen dan kesungguhan nenek moyang Madura dalam berusaha dan bertindak jangan sampai pada ahirnya kita hanya jadi penonton dan bahkan menjadi babu di daerah sendiri sehingga yang terjadi semua jenis kekayaan yang miliki di eksploitasi dan ironinya yang mengelola adalah pihak asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat banyak potensi Sumenep, sebagai bentuk upaya Pemkab perlu ada keseriusan dalam pengelolaan demi kelestarian khazanah ini. ***Pertama*** memperkuat sistem ekonomi kerakyatan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. ***Kedua*** adalah mempercepat pembangunan wilayah kepulauan secara menyeluruh, proporsional, mempercepat pembangunan khususnya di wilayah yang tertinggal baik yang di kepulauan maupun daratan secara proporsional, yang mana kegiatan ini mencakup semua aspek, baik sarana dan prasarana, perhubungan, sarana informasi, kelistrikan dan sebagainya. ***Ketiga*** adalah menyempurnakan sistem pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang ber-orientasi pada keahlian, keterampilan dengan dilandasi oleh nilai-nilai agam**a** dan budaya**.** ***Keempat*** mewujudkan ketersediaan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dan yang terakhir. ***Kelima*** adalah meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.[10]

Dikaitkan dengan Visi Kabupaten Sumenep dalam RPJMD Sumenep Tahun 2011-2025 Pembangunan Kabupaten Sumenep adalah **"SUPER MANTAP"**: "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih,[11] Mandiri,[12] Agamis,[13] Nasionalis,[14] Transparan,[15] Adil[16] dan Profesional[17]"

[10] Mukhlishi, *Membongkar Patologi Khazanah Kewarganegaraan dalam Kacamata Loka-Global* (Yogyakarta: Yafat, 2015), 12-130.

[11] Bersih adalah sebuah ikhtiar untuk mewujudkan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan yang tidak terkontaminasi praktik-praktik korupsi, yang bisa menganggu kelancaran dan kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Daerah.

[12] Mandiri adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep makin sejahtera di sini memiliki dua makna, potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. SDA seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (home industri). Untuk mendukung visi pembangunan tersebut, kaitannya dengan Visi penataan ruang adalah: "memajukan Kabupaten Sumenep sebagai

---

mengatur dan mengurus proses pembangunan daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh masyarakat dan pemerintah daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).

[13]Agamis di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila konsep agama dijadikan modal/*spirit* dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

[14]Nasionalis adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

[15]Transparan atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government). Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (*citizen)* kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government)* adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab *(accountable),* yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak

[16]Adil adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir 'ketimpangan' distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty,* namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan *(need assesment)* masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan 'manis'nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.

[17]Profesional bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan 'orang luar' (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur dari kepulauan Madura “.

Untuk mewujudkan Visi penataan ruang, maka tujuan penataan ruang Kabupaten Sumenep adalah “mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minipolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata dan industri”.

D. Sosial Budaya dan Pendidikan

Kondisi sosial dan budaya penduduk di Kabupaten Sumenep akan digambarkan melalui data dan informasi terkait fasilitas pendidikan yang tersedia, jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin serta jumlah rumah penduduk di wilayah Kabupaten Sumenep.

1. Kondisi Fasilitas Pendidikan

Kabupaten Sumenep memiliki fasilitas pendidikan yang tersedia sudah cukup memadai, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Jumlah sekolah di Kabupaten Sumenep 1.474 unit, terdiri dari sekolah TK negeri, TK Swasta, SD Negeri, SD Swasta, SMP Negeri, SMP Swasta, SMA Negeri, SMA Swasta, SMK Negeri, dan SMK Swasta. Berikut akan disajikan data fasilitas pendidikan di Kabupaten Sumenep.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Banyaknya Lembaga Pendidikan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumenep

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH SEKOLAH				
		TK	SD	SMP	SMA/ SMK	PT
1	Pragaan	18	23	7	6	1
2	Bluto	32	30	5	3	1
3	Saronggi	23	29	2	0	0
4	Giligenting	6	13	3	1	0
5	Talango	21	25	4	1	0
6	Kalianget	13	24	2	2	0
7	Kota Sumenep	31	35	8	10	2
8	Batuan	8	7	1	2	2
9	Lenteng	25	28	6	6	0
10	Ganding	12	18	9	4	0
11	Guluk guluk	27	26	12	5	1
12	Pasongsongan	10	23	25	0	0
13	Ambuten	21	29	23	3	0
14	Rubaru	18	29	12	1	0
15	Dasuk	15	22	11	0	0
16	Manding	11	20	15	1	0
17	Batu Putih	5	23	8	1	0
18	Gapura	16	19	16	2	1
19	Batang-Batang	13	32	16	4	0
20	Dungkek	5	29	12	2	0
21	Nonggunong	8	14	7	1	0
22	Gayam	15	29	14	2	0
23	Raas	5	27	14	1	0
24	Sapeken	7	29	27	1	0
25	Arjasa	16	45	48	5	0
26	Kangayan	6	19	11	3	0
27	Masalembu	20	14	15	3	0
	Jumlah	**407**	**661**	**333**	**71**	**8**

Sumber: Sumenep Dalam Angka 2012 dengan revisi sesuai kondisi terkini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara prinsip pandangan peneliti sebelumnya dalam buku Sumenep Studies[18] Pendidikan Sumenep harus lebih pogresif, kehadiran pembangunan industri di Madura harus disambut dengan SDM yang mempuni berupa upaya meningkatkan taraf hidup (ekonomi) masyarakat Madura yang masih rendah menjadi lebih baik. Bisa memperkuat daya beli namun di sisi lain, harus ada upaya pendidikan moral sehingga hal ini mengundang kehawatiran dari berbagai sektor, seperti dekadensi moral, sosial budaya, eksploitasi sumber daya (alam dan manusia) serta terkikisnya nilai tradisi lokal Madura dapat difilter oleh kita dan masyarakat pada umumnya.

Sebagai acuan dari hasil penelitian ini adalah bagaimana dari setiap *stake holder* pendidikan lebih melakukan progres yang lebih baik agar proses pendidikan ini bisa terimplementasi sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat *(social need)* dan apa yang menjadi keunikan dari berbagai daerah dapat dikelola dengan berbagai usaha untuk melestarikan dari setiap *local knowlidge* dari berbagai daerah demi cita kemajuan berupa pendidikan progresif yang membumi.[19]

2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep mencapai 190.037 KK. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di wilayah

[18] Mukhlishi, *Sumenep Studies; Obrolan Menjanjikan Pasca Suramadu-an* (Yogyakarta: Yafat, 2014), 85

[19] Mukhlishi, *Dinamika Pendidikan Progresif Analisis pada SMA dan SMK Berbasis Pesantren di Timur Daya (Gapura, Dungkek, Batang Batang dan Batu Putih*, Hasil Riset (Sumenep: STKIP PGRI Sumenep, Tp, 2015), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Sumenep. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Batng-batang dengan jumlah 12.798 KK, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batuan dengan jumlah 1.547 KK. Berikut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Miskin per Kecamatan
di Kabupaten Sumenep

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
1	Pragaan	9.415
2	Bluto	10.112
3	Saronggi	4.197
4	Giligenting	2.771
5	Talango	10.495
6	Kalianget	6.960
7	Kota sumenep	5.238
8	Batuan	1.547
9	Lenteng	9.619
10	Ganding	5.121
11	Guluk guluk	8.928
12	Pasongsongan	6.210
13	Ambunten	10.709
14	Rubaru	5.161
15	Dasuk	4.567
16	Manding	6.276
17	Batu putih	12.260
18	Gapura	5.640
19	Batang-batang	12.798
20	Dungkek	7.171
21	Nonggunong	3.928
22	Gayam	9.170
23	Raas	6.251
24	Sapeken	6.384
25	Arjasa	9.662

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	NAMA KECAMATAN	Jumlah Penduduk Miskin (KK)
26	Kangayan	5.452
27	Masalembu	3.995
	Jumlah	**190.037**

Sumber: BPMP-KB Tahun 2012

3. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Gambaran mengenai kelembagaan pemerintah daerah sangat penting untuk mengetahui potensi-potensi kelembagaan di jajaran Pemerintah Kabupaten Sumenep yang dapat ikut bergerak dan bekerja dalam membangun program sanitasi. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sumenep tertuang dalam Peraturan Daerah No. 15 s/d 19 Tahun 2008 dan No. 17 Tahun 2011. Berikut akan ditampilkan gambar struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sumenep

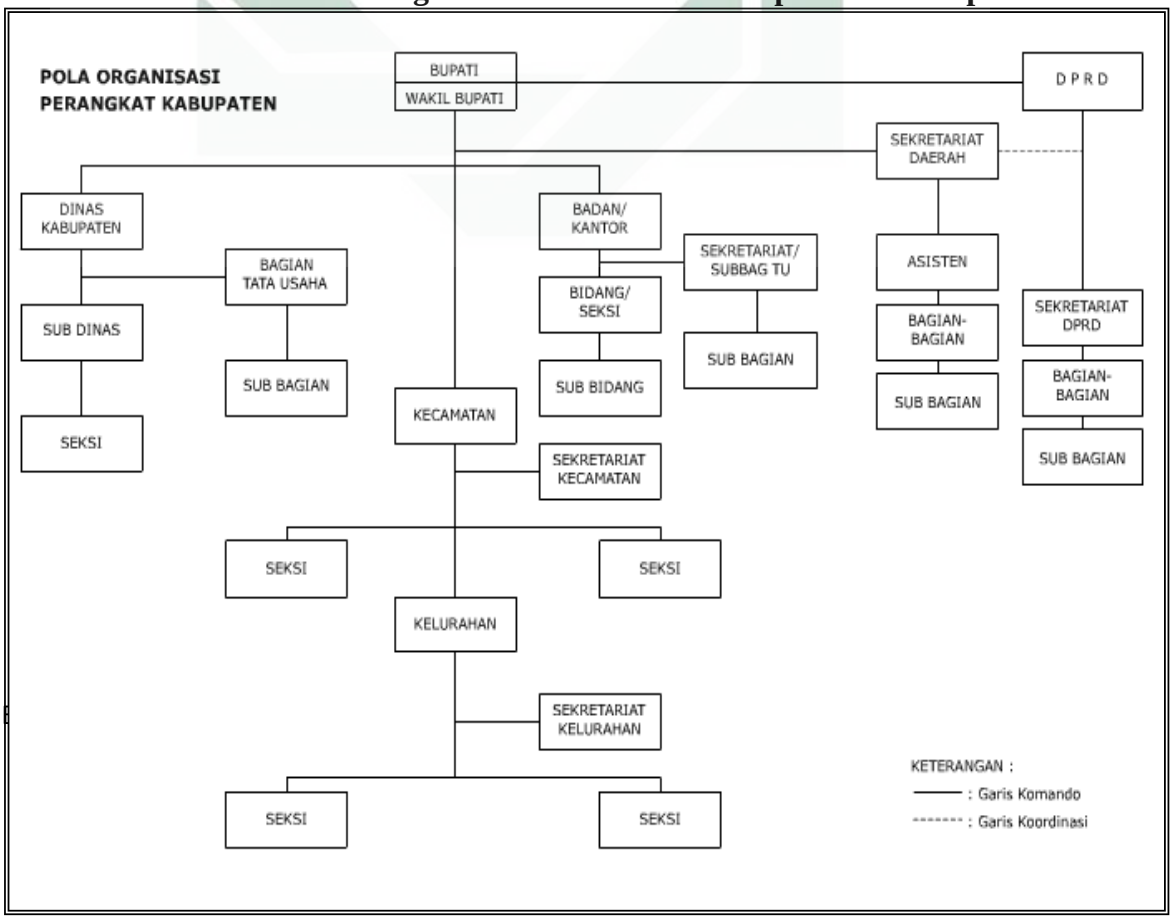

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Ikhtiar Penataan Kebijakan Pendidikan

Setiap bangsa pasti mencita-citakan agar menjadi bangsa yang maju dalam berbagai bidang, termasuk juga Kabupaten Sumenep agar Sumenep menjadi masyarakatnya cerdas, harus memenuhi tiga unsur, yaitu terpenuhinya SDM (sumber daya manusia), SDA (sumber daya alam) dan sumber daya modal. Ketiga bagian tersebut dapat dirinci ke dm sesuai dengan rasio jumlah dalam pemenuhan: *pertama*, pemetaan penempatan tenaga pendidikan dan kependidikan harus tepat dengan memikirkan wilayah administrasi. Penyediaan tenaga pengajar harus sesuai dengan SPM (standar pelayanan minimal) pendidikan.[20]

Melihat semua ini tidak bisa mengabaikan keluhan kurangnya tenaga pengajar dari satuan pendidikan sampai di pelosok terpencil dan kepulauan. Bukan karena guru yang suka 'bolos', tetapi memang jumlah tenaga pengajar belum sesuai rasio jumlah rombongan belajar. Akhirnya, salah satu jalan 'pintas' untuk megarasi hal tersebut adalah mengangkat guru honorer dengan segala kualifikasinya. Ini sebuah tantangan besar dan PR panjang yang harus diselesaikan pemkab Sumenep, sebab sebagaimana kita tahu, pengangkatan guru PNS bukan kewenangan mutlak daerah.

[20]SPM merupakan standart pelayanan minimal publik yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Adanya SPM akan menjamin pelayanan minimal yang berhak diperoleh warga masyarakat dari Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, SPM merupakan tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti: Kesehatan, Pendidikan, Air minum, Perumahan dan Lain-lain. Lihat Perumusan dan Penyusunan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kabupaten Sumenep, Kerjasama Pemkab Sumenep dengan LPPM Universitas Airlangga Tahun 2006, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Acapkali tidak adanya peerataan antarsatuan pendidikan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kendala terpenuhinya SPM.[21] Sangat ironis jika sebuah sekolah mendapatkan lebih dari satu kali bantuan sarana pendidikan yang sama, sementara sekolah lainnya sama sekali tidak mendapatkannya. Pemetaan tidak serta-merta bermakna pemeratan, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan banyak aspek. Salah satunya, misalnya, jumlah peserta didik di setiap rombelnya harus menjadi pertimbangan.

Ketiga, memaksimalkan keterlibatan masyarakat alam pengelolaan pendidikan. Pada tingkatan satuan pendidikan, keterlibatan komite sekolah menjadi sangat penting. Selama ini tidak sedikit komite sekolah hanya sebagai legislasi yang hanya membubuhkan tanda tangan untuk pengesahan pencairan bantuan dana. Hal lain yang perlu digagas adalah komite sekolah di tingkat kecamatan. Jika di tingkat kabupaten terdapat dewan pendidikan maka tingkatan dibawahnya juga harus dibentuk dewan serupa untuk bersama-sama memikirkan pendidikan. Perlu diingat bahwa komite sekolah bukan terbatas pada orang tua atau wali siswa saja, melainkan harus melibatkan *stakeholder* yang ada di sekolah itu, dan pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Juga tidak kalah petingnya melibatkan LSM (lembaga swadaya masyarakat)

[21] Untuk menunjang hal tersebut Pemerintah daerah mengalokasikan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu. Lihat A. Busyra Karim, *Ijtihad Pendidikan; catatan pemikiran dan Solusi dalam membangun Sumenep 2010-2015* (Surabaya: Muara Progresif, 2015), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang peduli terhadap pendidikan. Sayangnya, untuk yang terakhir ini, di sumenep belum ada LSM yang khusus begerak di bidang pendidikan. LSM yang dimaksud adalah LSM yang benar-benar swadaya dan memberdayakan masyarakat, bukan hanya mengritik pengelolaan pendidikan tanpa memberikan solusi atas kekurangan yang ada.

Keempat, memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan. Memberdayakan bukan hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, meskipun hal tersebut tidak bisa diabaikan, tetapi keberdayaan tenaga pendidik menjadi professional adalah hal yag sangat penting. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya, pendidikan dan pelatihan yang tepat sasaran. Selama ini, tidak sedikit guru yang ditalih pada pelatihan tertentu tidak sesuai degan kualifikasi dan keahliannya yang menyebabkan tidak mampu menularkan ilmu dan pengetahuan yang didapatnya. Jika birokrasi pendidikan salah melatih dan salah menunjuk guru, bisa dilihat hasilnya nanti. Untuk itu, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme guru harus direncanakan dengan matang, tidak asal comot dan menghambur-hamburkan dana. Hal ini penting dalam melaksanakan pemerintahan yang efektif dalam efisien. sehingga yang tercipta adalah pemrintahan yang akuntabel dan punya *trust* bagi seluruh warganya.

Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan bagian keempat pasal 28 yang berbunyi; Bupati Wali Kota bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan Nasional di daerahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.[22]

Kelima, Bupati Sumenep harus berani merombak kabinet dalam birokrasi pendidikan. Orang-orang yang tidak mumpuni dalam pengelolaan pendidikan tidak perlu masuk ke dalam jajaran kebinet pendidikan tadi. Untuk itu, selektifitas penunjukan kabinet pendidikan harus benar-benar dilakukan. Bupati tidak hanya menerima pertimbangan baperkajat tetapi juga perlu mempertimbangkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Perlu disadari, kesalahan penempatan pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan (khususnya) akan memengaruhi pengelolaan pendidikan beberapa tahun ke depan. Pengaruh yang paling fatal adalah mengorbankan generasi masa depan bangsa.

Keenam, berani menggandeng investor dalam pengelolaan pendidikan. Pendidikan gratis bukan berarti tanpa ievestor. Peraturan presiden No. 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) mengisyaratkan dunia pendidikan dan dunia kerja disandingkan untuk mendapatkan pengakuan internasional. Sebagaimana dalam perpres, KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan

[22] Tim Penyususn, *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep* (Sumenep; Diperbanyak oleh Bagian Hukum Sekda Kabupaten Sumenep, 2010), 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberbagai sektor. Melibatkan investor bukan secara langsung. Keuntungan dapat diraih oleh investor dengan cara berjenjang. Sekarang tinggal bagaimana pemkab membangun kerja sama dengan investor.

Ketujuh, meningkatkan pengawasan pegeloaan pendidikan secara komprehensip. Selama ini pengawasan hanya sebatas pengawasan manajerial dan akademik yang terpisah. Tekomendasi dari hasil pengawasan itu harus ditindaklanjuti dan menjadi acuan untuk memperbaiki pengelolaan pendidikan mendatang. Untuk itu, perlu peningkatan perang pengawas sekolah yang selama ini dikebiri oleh kepentingan pelaku birokrasi pendidikan. Selain itu perlu dibentuk Tim kepengawasan sekolah yang terdiri atas berbagai kalangan yang berkompeten di bidang pendidikan. Misalnya, Tim yang terdiri atas gabungan pejabat struktural dengan fungsional. Jika mau lengkap, misalnya terdiri atas inspektorat, dewan pendidikan, dan organisasi profesi.

Sebagai alat, tentu pendidikan tidak berjauhan dengan politik. Politik di sini harus diartikan sebagai strategi. Bukan politik yang disejajarkan sebagaimana pileg (pemiliu legislatif) beberapa waktu lalu. Politik dalam pendidikan tidak bisa disama-sebidangkan dengan politik dalam pileg. Perlu diketahui, pendidikan juga mengelola konten politik, misalnya bisa ditunjuk langsung pada perkuliahan atau program studi di perguruan tinggi (PT) yang membidangi khusus ilmu sosial dan politik. Politik, jika diperlukan dengan baik, adalah hasil dari penggodokan yang bisa diibaratkan ayam yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan dua macam benda: tahi, telur, dan politik yang bersih itulah telur dari pendidikan.[23]

Hal ini penting dalam pandangan peneliti agar orientasi pendidikan lebih diintensifkan karena membangun peradaban yang dapat setara dengan bangsa lain harus dimulai dari kualitas pendidikan yang harus ditopang dengan berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang punya progres dalam membangun bangsa yang beradab bermartabat dan di segani oleh bangsa lain.

Proses dalam membangun sebuah peradaban bangsa yang baik dan kuat, bukanlah pekerjaan sederhana yang dapat dilakukan dengan sakali ayunan tangan. Karena, kekuatan-kekuatan eksternal dan tantangan globalisasi pasti akan berusaha menghambat tatanan masyarakat yang sedang dibangun tersebut.

Sejarah diberbagai belahan dunia telah mencatat dan memperlihatkan bahwa tidak semua reformasi, revolusi dan perubahan sosial secara otomatis dapat berjalan dengan mulus dan senantiasa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Sebagai contoh, Revolusi perancis yang terjadi tahun 1787, memerlukan waktu 13 tahun untuk mencapai kondisi politik yang stabil. Majelis Nasional pasca revolusi yang dibentuk pada 1789 masih diwarnai oleh orang-orang yang tidak membawa aspirasi perubahan dan 43 % terdiri dari pejabat-pejabat yang bisa disuap.

---

[23] A. Busyro Karim, *Menuju Sumenep Cerdas 2015*, Ed, Muhammad Saidi (Bandung: Absolut Media, 2014), 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika kita menelisik pada bangsa kita kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, ternyata juga bukanlah sebuah jaminan bahwa manusia Indonesia akan selamanya terbebas dari penindasan dan keterbelakangan. Karena ternyata, kezaliman dan kesewenang-wenangan bukan cuma watak khas dari imperialisme Belanda, Portugis, Jepang atau Inggris saja. Akan tetapi, ia adalah watak dasar dari semua orang yang hatinya tidak tergantung pada nilai-nilai moral, keimanan, dan keadilan. Sejak tahun 1950-an, ternyata kita telah mengalami tindakan represif dari dua periode rezim otoriter yang kontroversi, yakni orde lama dan orde baru. Padahal, kedua rezim itu tumbuh sebagai hasil sebuah gerakan yang pada dasarnya bercita-cita menegakkan kemerdekaan sebagai hak asasi manusia dan memajukan peradaban bangsa Indonesia.

Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan fisikal yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan. Fitrah adalah titik tolak kemuliaan manusia, baik sebagai bawaan seseorang sejak lahir atau sebagai hasil proses pendidikan.

Keterkaitan antara ilmu secara spesifik pendidikan dan pembelajarandengan nilai sebaliknya dikembalikan kepada tujuan awal dari ilmu tersebut. Pada awalnya ilmu muncul sebagai upaya manusia untuk berinteraksi dengan sesama dan juga dengan alam dan dalam taraf-taraf tertentu sebagai upaya manusia untuk memanfaatkan alam bagi dirinya dengan usaha menjaga dan melestarikannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disimpulkan ilmu dari awal kesejarahannya tidak bersifat netral (*value bound*), namun berpihak kepada kepentingan manusia. Sebagai hasil produk keilmuan, ilmu memang bebas nilai, namun ilmu juga tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai yang dianut oleh para penemu dan pemakainya. Oleh karenanya ilmu terkait oleh nilai-nilai, baik moral, etika dan agama, dari para penemu dan para pengguna keilmuan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id